



► PERATURAN DAERAH

Dewan Tetapkan 14 Usulan Regulasi

UMBULHARJO—Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Jogja menyepakati daftar raperda yang akan dibahas pada 2026. .

Ariq Fajar Hidayat
redaksi@harianjogja.com

Total ada 14 raperda yang masuk proyeksi pembentukan, terdiri atas lima raperda prakarsa Dewan dan sembilan raperda prakarsa Pemkot Jogja

Ketua Bapemperda DPRD Kota Jogja, Ipung Purwandari, menyebut daftar tersebut sudah melalui pembahasan internal dan pemetaan kebutuhan regulasi di masing-masing komisi. "Kami memastikan semua raperda yang masuk daftar 2026 relevan dengan

► Daftar usulan sudah dibahas secara internal dan pemetaan kebutuhan regulasi di masing-masing komisi.

► 5 Raperda prakarsa Dewan diprioritaskan karena bersinggungan dengan layanan publik dan kelompok rentan.

kebutuhan masyarakat serta arah pembangunan kota," ujarnya, Jumat (14/11).

Lima raperda prakarsa DPRD dipastikan menjadi prioritas pembahasan. Komisi A mengusulkan Raperda Keterbukaan Informasi Publik pada triwulan II. Komisi B membawa Raperda Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pengembangan UMKM yang dijadwalkan masuk triwulan III. Komisi C mengusulkan Raperda Penyelenggaraan Inovasi

Daerah pada triwulan II.

Sementara itu, Komisi D mengajukan Raperda Kota Layak Anak untuk dibahas pada triwulan I. Bapemperda juga menetapkan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai prioritas yang masuk triwulan I.

Ipung menerangkan lima raperda prakarsa Dewan tersebut diprioritaskan karena bersinggungan langsung dengan layanan publik dan penguatan kelompok rentan. "Isu perempuan, anak, keterbukaan informasi, serta UMKM menjadi fokus kami karena dampaknya sangat luas," terang dia.

Selain usulan Dewan, terdapat sembilan raperda prakarsa Pemkot Jogja, dan enam di antaranya masuk prioritas, yakni Raperda Penyelenggaraan Transformasi Digital usulan Diskominfosan pada triwulan I, serta Raperda

Jaminan Sosial dari Dinas Sosial pada triwulan I.

DLH mengusulkan Raperda Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2025-2055 yang juga ditargetkan masuk triwulan I. Dinas Kesehatan membawa usulan Perubahan atas Perda Kawasan Tanpa Rokok untuk triwulan II.

Dua raperda prioritas lain yaitu Raperda Penyertaan Modal BPD DIY yang diajukan Bagian Perekonomian dan Kerja Sama pada triwulan II, serta Perubahan atas Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah usulan BPKAD pada triwulan II.

Tiga raperda lainnya berstatus bukan prioritas dan baru akan dibahas apabila memungkinkan pada perubahan Propemperda 2026. Ketiganya meliputi Raperda Ketahanan Pangan, Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, serta Raperda Keamanan Pangan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005